



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022, perlu mengatur Estimasi Biaya/Harga Tertinggi di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditemukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
10. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- I. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
- II. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang.
- III. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- IV. Honorarium/Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara.
- V. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- VI. Satuan Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- VII. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil.
- VIII. Honorarium Aparatur Sipil Negara.
- IX. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Kegiatan.
- X. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara.
- XI. Biaya Konsumsi Rapat.
- XII. Biaya Cetak dan Penggandaan.
- XIII. Biaya Jasa Kantor.
- XIV. Satuan Biaya Paket Data dan Komunikasi.
- XV. Biaya Rumah Tangga, Rumah/Kantor/Dinas.
- XVI. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
- XVII. Biaya Pemeliharaan dan Sewa Bangunan.
- XVIII. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor.
- XIX. Biaya Pakaian Dinas (Harga Maksimal).
- XX. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

**BAB III
STANDAR BIAYA**

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada Tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 453

STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BASIS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp.	BIAYA
I. HONORARIUM TERANGGIBER JABATAN PENGELOLA KEUANGAN				
	1. Penggajian Anggaran (PA)			
a.	Sisa Penghasilan Tetap Rp1.400.000.000	OR	Rp.	1.400.000
b.	Sisa Penghasilan tetap Rp1.200.000.000 s.d Rp270.000.000	OR	Rp.	1.200.000
c.	Sisa Peng. tetap diatas Rp270.000.000 s.d Rp140.000.000	OR	Rp.	1.140.000
d.	Sisa Peng. tetap diatas Rp140.000.000 s.d Rp110.000.000	OR	Rp.	1.100.000
e.	Sisa Peng. tetap diatas Rp110.000.000 s.d Rp25.000.000	OR	Rp.	1.100.000
f.	Sisa Peng. tetap diatas Rp25.000.000 s.d Rp5.000.000	OR	Rp.	1.100.000
g.	Sisa Peng. tetap diatas Rp5.000.000 s.d Rp1.000.000	OR	Rp.	1.100.000
h.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.000.000 s.d Rp500.000	OR	Rp.	1.100.000
i.	Sisa Peng. tetap diatas Rp500.000 s.d Rp250.000	OR	Rp.	1.100.000
j.	Sisa Peng. tetap diatas Rp250.000 s.d Rp100.000	OR	Rp.	1.100.000
k.	Sisa Peng. tetap diatas Rp100.000 s.d Rp50.000	OR	Rp.	1.100.000
l.	Sisa Peng. tetap diatas Rp50.000 s.d Rp25.000	OR	Rp.	1.100.000
m.	Sisa Peng. tetap diatas Rp25.000 s.d Rp10.000	OR	Rp.	1.100.000
n.	Sisa Peng. tetap diatas Rp10.000 s.d Rp5.000	OR	Rp.	1.100.000
o.	Sisa Peng. tetap diatas Rp5.000 s.d Rp1.000	OR	Rp.	1.100.000
p.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.000	OR	Rp.	1.100.000
	2. Biaya Penggajian Anggaran (KPA)			
a.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.400.000.000	OR	Rp.	1.400.000
b.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.200.000.000 s.d Rp270.000.000	OR	Rp.	1.200.000
c.	Sisa Peng. tetap diatas Rp270.000.000 s.d Rp140.000.000	OR	Rp.	1.140.000
d.	Sisa Peng. tetap diatas Rp140.000.000 s.d Rp110.000.000	OR	Rp.	1.100.000
e.	Sisa Peng. tetap diatas Rp110.000.000 s.d Rp25.000.000	OR	Rp.	1.100.000
f.	Sisa Peng. tetap diatas Rp25.000.000 s.d Rp5.000.000	OR	Rp.	1.100.000
g.	Sisa Peng. tetap diatas Rp5.000.000 s.d Rp1.000.000	OR	Rp.	1.100.000
h.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.000.000 s.d Rp500.000	OR	Rp.	1.100.000
i.	Sisa Peng. tetap diatas Rp500.000 s.d Rp250.000	OR	Rp.	1.100.000
j.	Sisa Peng. tetap diatas Rp250.000 s.d Rp100.000	OR	Rp.	1.100.000
k.	Sisa Peng. tetap diatas Rp100.000 s.d Rp50.000	OR	Rp.	1.100.000
l.	Sisa Peng. tetap diatas Rp50.000 s.d Rp25.000	OR	Rp.	1.100.000
m.	Sisa Peng. tetap diatas Rp25.000 s.d Rp10.000	OR	Rp.	1.100.000
n.	Sisa Peng. tetap diatas Rp10.000 s.d Rp5.000	OR	Rp.	1.100.000
o.	Sisa Peng. tetap diatas Rp5.000 s.d Rp1.000	OR	Rp.	1.100.000
p.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.000	OR	Rp.	1.100.000
	3. Biaya Pembayar Kesehatan (PKK)			
a.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.400.000.000	OR	Rp.	1.400.000
b.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.200.000.000 s.d Rp270.000.000	OR	Rp.	1.200.000
c.	Sisa Peng. tetap diatas Rp270.000.000 s.d Rp140.000.000	OR	Rp.	1.140.000
d.	Sisa Peng. tetap diatas Rp140.000.000 s.d Rp110.000.000	OR	Rp.	1.100.000
e.	Sisa Peng. tetap diatas Rp110.000.000 s.d Rp25.000.000	OR	Rp.	1.100.000
f.	Sisa Peng. tetap diatas Rp25.000.000 s.d Rp5.000.000	OR	Rp.	1.100.000
g.	Sisa Peng. tetap diatas Rp5.000.000 s.d Rp1.000.000	OR	Rp.	1.100.000
h.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.000.000 s.d Rp500.000	OR	Rp.	1.100.000
i.	Sisa Peng. tetap diatas Rp500.000 s.d Rp250.000	OR	Rp.	1.100.000
j.	Sisa Peng. tetap diatas Rp250.000 s.d Rp100.000	OR	Rp.	1.100.000
k.	Sisa Peng. tetap diatas Rp100.000 s.d Rp50.000	OR	Rp.	1.100.000
l.	Sisa Peng. tetap diatas Rp50.000 s.d Rp25.000	OR	Rp.	1.100.000
m.	Sisa Peng. tetap diatas Rp25.000 s.d Rp10.000	OR	Rp.	1.100.000
n.	Sisa Peng. tetap diatas Rp10.000 s.d Rp5.000	OR	Rp.	1.100.000
o.	Sisa Peng. tetap diatas Rp5.000 s.d Rp1.000	OR	Rp.	1.100.000
p.	Sisa Peng. tetap diatas Rp1.000	OR	Rp.	1.100.000

	7	Bendahara Pengeluaran Pembekalan Bendahara Penyelenggara Peristiwa/ Staf Pengabdian Masyarakat		
	a.	Nilai Page dan atau Rp 100 juta	04	Rp
	b.	Nilai Page dan atau Rp100 juta and Rp250 juta	04	Rp
	c.	Nilai Page dan atau Rp250 juta and Rp 500 juta	04	Rp
	d.	Nilai Page dan atau Rp500 juta and Rp 1 miliar	04	Rp
	e.	Nilai Page dan atau Rp1 miliar and Rp2,5 miliar	04	Rp
	f.	Nilai Page dan atau Rp2,5 miliar and Rp5 miliar	04	Rp
	g.	Nilai Page dan atau Rp5 miliar and Rp10 miliar	04	Rp
	h.	Nilai Page dan atau Rp10 miliar and Rp25 miliar	04	Rp
	i.	Nilai Page dan atau Rp25 miliar and Rp50 miliar	04	Rp
	j.	Nilai Page dan atau Rp50 miliar and Rp 75 miliar	04	Rp
	k.	Nilai Page dan atau Rp75 miliar and Rp100 miliar	04	Rp
	l.	Nilai Page dan atau Rp100 miliar and Rp250 miliar	04	Rp
	m.	Nilai Page dan atau Rp250 miliar and Rp500 miliar	04	Rp
	n.	Nilai Page dan atau Rp500 miliar and Rp1 miliar	04	Rp
	o.	Nilai Page dan atau Rp1 miliar and Rp2 miliar	04	Rp
	p.	Nilai Page dan atau Rp2 miliar and Rp5 miliar	04	Rp
	q.	Nilai Page dan atau Rp5 miliar	04	Rp
	8	Dejabet Pengaji Tughan dan Pemandangan dan Survei Perairan Melayu		
	a.	Nilai Page dan atau Rp 100 juta	04	Rp
	b.	Nilai Page dan atau Rp100 juta and Rp250 juta	04	Rp
	c.	Nilai Page dan atau Rp250 juta and Rp500 juta	04	Rp
	d.	Nilai Page dan atau Rp500 juta and Rp 1 miliar	04	Rp
	e.	Nilai Page dan atau Rp1 and Rp2,5 miliar	04	Rp
	f.	Nilai Page dan atau Rp2,5 miliar and Rp5 miliar	04	Rp
	g.	Nilai Page dan atau Rp5 miliar and Rp10 miliar	04	Rp
	h.	Nilai Page dan atau Rp10 miliar and Rp25 miliar	04	Rp
	i.	Nilai Page dan atau Rp25 miliar and Rp50 miliar	04	Rp
	j.	Nilai Page dan atau Rp50 miliar and Rp75 miliar	04	Rp
	k.	Nilai Page dan atau Rp75 miliar and Rp100 miliar	04	Rp
	l.	Nilai Page dan atau Rp100 miliar and Rp250 miliar	04	Rp
	m.	Nilai Page dan atau Rp250 miliar and Rp500 miliar	04	Rp
	n.	Nilai Page dan atau Rp500 miliar and Rp1 miliar	04	Rp
	o.	Nilai Page dan atau Rp1 and Rp2 miliar	04	Rp
	p.	Nilai Page dan atau Rp2 miliar	04	Rp
	9	KELOMPOK/UM FARMASITIKAL JAWAR PERKULIAHARAHAN		
		Bendahara Pengabdian Masyarakat		
	9.1	Bendahara Barang (Sekretariat Pemda/Sekretariat Dewan)		
	a.	Nilai Page dan atau Rp15 and Rp 25 juta	04	Rp
	b.	Nilai Page dan atau Rp 25 juta and Rp 50 juta	04	Rp
	c.	Nilai Page dan atau Rp 50 juta and Rp 100 juta	04	Rp
	d.	Nilai Page dan atau Rp 100 juta and Rp 200 juta	04	Rp
	e.	Nilai Page dan atau Rp 200 juta and Rp 500 juta	04	Rp
	f.	Nilai Page dan atau Rp 500 juta and Rp 1 miliar	04	Rp
	g.	Nilai Page dan atau Rp 1 and Rp 2 miliar	04	Rp
	h.	Nilai Page dan atau Rp 2 and Rp 5 miliar	04	Rp
	9.2	Bendahara Barang Perikanan/Akuisitas Pemda/Sekretariat Dewan		
	a.	Nilai Page dan atau Rp 10 juta and 50 juta	04	Rp
	b.	Nilai Page dan atau Rp 50 juta and Rp 100 juta	04	Rp
	c.	Nilai Page dan atau Rp 100 juta and Rp 200 juta	04	Rp
	d.	Nilai Page dan atau Rp 200 juta and Rp 500 juta	04	Rp
	e.	Nilai Page dan atau Rp 500 juta and Rp 1000 juta	04	Rp
	f.	Nilai Page dan atau Rp 1000 juta and Rp 2000 juta	04	Rp
	g.	Nilai Page dan atau Rp 2000 juta and Rp 5000 juta	04	Rp

III.2	Kelembagaan Perangkat Desa Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (KUPKAR)			
a	Segala	0%	Rp.	1.700.000
b	Sekretaris/Staff Pereksekusi	0%	Rp.	150.000
DI. HONORARIUM/NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBINA ACARA				
a	Mentor/Orator/Pengajar/Memberi/Orator/Kelembagaan	0%	Rp.	1.700.000
b	Yusuf/Orator/Pengajar/dan/peserta/peserta (Kuliah 2 atau 3 kali) (PADA) sebagai narasumber yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	1%	Rp.	1.000.000
c	Narasumber/peserta/peserta/peserta/peserta (Kuliah 2 atau 3 kali) (PADA) sebagai narasumber/kelembagaan/kelembagaan yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	1%	Rp.	1.000.000
d	Yusuf/Orator/Pengajar/dan/peserta/peserta (Kuliah 2 atau 3 kali) (PADA) sebagai narasumber/kelembagaan/kelembagaan yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	0%	Rp.	750.000
e	Yusuf/Orator/Pengajar/dan/peserta/peserta (Kuliah 2 atau 3 kali) (PADA) sebagai narasumber/kelembagaan/kelembagaan yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	0%	Rp.	500.000
f	Kontribusi/Pengajar yang berasal dari dalam Desa pendampingan	0%	Rp.	300.000
g	Kontribusi/Pengajar yang berasal dari luar Desa pendampingan	0%	Rp.	400.000
h	Moderator	Orang/Orang	Rp.	500.000
i	Kelembagaan/Kelembagaan/Pembina Acara	Orang/Orang	Rp.	500.000
j	Pengajar/Pengajar	Orang/Orang	Rp.	200.000
k	Kelembagaan/Operator Komputer	Orang/Orang	Rp.	250.000
l	Kelembagaan/Kelembagaan	Orang/Orang	Rp.	100.000
Operasi Server/Admin Aplikasi/Admin SIAP/Admin STRUK/SIMDA				
a	Admin Server dan Operator Server	Orang/Orang	Rp.	500.000
b	Admin Aplikasi dan Operator Aplikasi (Total 2 Orang)	Orang/Orang	Rp.	500.000
c	Admin Sistem Sistem Kerja (SSK), Sistem Kerja Masyarakat (SKM), Admin SIMS (Harga Satuan Pokok Kegiatan dan HSK) (Harga Satuan Kegiatan dan HSK) Regional	Orang/Orang	Rp.	500.000
V. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN HENDIKAN DAN TELATIHAN INIKUATI				
a	Honorarium Pembina	0%	Rp.	1.000.000
b	Honorarium Pengajar yang berasal dari desa yang menerima pendampingan	0%	Rp.	500.000
c	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar desa yang menerima pendampingan	0%	Rp.	200.000
d	Honorarium Pembina Mod 2 (RUB)	Per Mod.1	Rp.	500.000
e	Honorarium Pembina Pengajar Segala (RUB)			
VI. RANGKAIAN DESA				
	Kelembagaan/Kelembagaan	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan/Wakil Ketua	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan	0%	Rp.	300.000
	Kelembagaan	0%	Rp.	400.000
f	Kelembagaan/Kelembagaan	0%	Rp.	600.000
	Kelembagaan/Kelembagaan	0%	Rp.	600.000
	Kelembagaan/Wakil Ketua	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan/Kelembagaan dan 20 hari			
	Kelembagaan/Kelembagaan	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan/Wakil Ketua	0%	Rp.	400.000
	Kelembagaan	0%	Rp.	600.000
	Kelembagaan	0%	Rp.	600.000
VII. SATUAN DESA BERKEMBARANG BUNDA DAYA MANDARA				
a	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Orang/Orang	Rp.	500.000
b	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan			
c	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan			
d	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Orang/Orang	Rp.	100.000
e	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	1 Kali	Rp.	400.000
f	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	1 Kali	Rp.	400.000
	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan			
	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Orang/Orang	Rp.	100.000
	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Orang/Orang	Rp.	200.000
	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	1 Kali	Rp.	400.000
	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	1 Kali	Rp.	500.000

		Dokter Hewan	Orang/Bulan	Rp.	2.500.000
		Paramedik Veteriner (PV)	Orang/Bulan	Rp.	2.200.000
		Paramedik Kesehatan (PMK)	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
		Paramedik Kesehatan (PMTK)	Orang/Bulan	Rp.	1.800.000
		Asisten Perawatan	Orang/Bulan	Rp.	1.800.000
		Praktisi Insusurven	Orang/Bulan	No.	500.000
		Insusurven (Insusurven) Desentral	Orang/Bulan	Rp.	220.000
		Grup Ekspansi/Rekrutmen/Asisten	Orang/Bulan	Rp.	200.000
		Seper. Kerja DPRD	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
		Pelaksana Program	Orang/Bulan	Rp.	1.600.000
		Prasyarat Pelaksana	Orang/Bulan	No.	500.000
		Supervisor/Wakil Kepala Ekspansi DPRD/ Kepala DPRD	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Supervisor GIB	Orang/Bulan	No.	500.000
		Staff Pengawas Ekspansi pada DPRD	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Staff Pengawas (SP) Ekspansi/Insusurven	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Orang/1 GIB	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Orang/10 orang	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Staff Khawatir dan Keamanan Harah	Orang/Bulan	Rp.	4.500.000
		Pengawal Perilaku Warga	Orang/Bulan	Rp.	200.000
		Orang/10 orang/10 orang/10 orang/10 orang/10 orang	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
VIII. Monev/evaluasi Aparatur Sipil Negara					
		Auditor Hutan/Wakil Bupati	Orang/Bulan	Rp.	2.500.000
		Auditor Kesehatan/Desentral	Orang/Bulan	Rp.	1.500.000
		Petugas Insusurven	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Petugas Pemantau/Insusurven/Supervisor/Insusurven dan Insusurven/Insusurven	Orang/Bulan	Rp.	200.000
		Supervisor/Insusurven/Insusurven	Orang/Bulan	No.	2.000.000
		Orang/10 orang/10 orang/10 orang	Orang/Bulan	Rp.	200.000
IX. BOKORABUM Yang PELAKSANA KEGIATAN DAN TIK KUALITAS					
	IX.1	Beasiswa TIK Pelaksana Kegiatan			
		Yang Didukung Oleh Kepala Daerah			
		Pengarah	Orang/Bulan	No.	1.500.000
		Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp.	1.200.000
		Koruk	Orang/Bulan	Rp.	1.000.000
		Wakil Koruk	Orang/Bulan	Rp.	800.000
		Sekretaris	Orang/Bulan	Rp.	700.000
		Anggota	Orang/Bulan	Rp.	500.000
	IX.2	Yang Didukung Oleh Sekretaris Daerah			
		Pengarah	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
		Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp.	700.000
		Koruk	Orang/Bulan	Rp.	500.000
		Wakil Koruk	Orang/Bulan	Rp.	400.000
		Sekretaris	Orang/Bulan	Rp.	300.000
		Anggota	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
	IX.3	Honorarium/Seorang/10 orang/10 orang/10 orang			
		Yang Didukung Oleh Sekretaris Daerah			
		Koruk/Wakil Koruk	Orang/Bulan	Rp.	200.000
		Anggota	Orang/Bulan	Rp.	200.000
	IX.4	Insusurven/Program/Insusurven/Insusurven/Insusurven			
		Insusurven	Orang/Bulan	Rp.	1.500.000
		Program	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
		Koruk	Orang/Bulan	Rp.	1.500.000
		Wakil Koruk	Orang/Bulan	Rp.	2.000.000
		Sekretaris	Orang/Bulan	Rp.	1.500.000
		Anggota	Orang/Bulan	Rp.	1.500.000

J.	BATUAN BAYU BANGUNAN DAN/ATAU MANAN LESCOUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA			
	SATUAN BANGUNAN LEMBUHAN DAN MANAN LEMBUHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA			
	X.1 Bangunan			
	a Bangunan I	01	Rp	11.000
	b Bangunan II	02	Rp	11.000
	c Bangunan III	03	Rp	33.000
	d Bangunan IV	04	Rp	25.000
	X.2 Bangunan Lantai			
	a Bangunan Lantai	01	Rp	75.000
	b Bangunan II	02	Rp	27.000
	c Bangunan III	03	Rp	11.000
	SATUAN BANGUNAN LEMBUHAN DAN MANAN LEMBUHAN BAGI KOP. ATAS/OK SIPIL NEGARA			
	a Bangunan Atas			
	b Bangunan	04	Rp	26.000
	c Bangunan Lantai	05	Rp	11.000
K.	Biaya EDUKASI RAPAT			
	a Jaminan Makanan/Minuman	Gunggung	Rp	20.000
	b Jaminan Malar (Nasi/Kopi)	Gunggung	Rp	25.000
	c Jaminan Kebutuhan Lain-lain	Gunggung	Rp	20.000
L.	BIBLIOTEKA DAN PERAGARAAN			
	a Buku			
	b. 1 s.d. 100	Lantai	Rp	150
	c. 101 s.d. 250	Lantai	Rp	250
	d. 251 s.d. 500	Lantai	Rp	350
	e. 501 s.d. 1.000 (lantai)	Lantai	Rp	10.000
	f. 1001 s.d. 2.000 (lantai)	Lantai	Rp	25.000
	g. 2001 s.d. 3.000 (lantai)	Lantai	Rp	40.000
	BIBLIOTEKA DAN PERAGARAAN			
M.	BIBLIOTEKA DAN PERAGARAAN			
	Biaya Jasa Kantor			
	Biaya Jasa Kantor (Rp)			
	a 0 s.d. 5.000.000	Dulan/Salaman	Rp	1.500.000
	b 5.000.000 s.d. 15.000.000	Dulan/Salaman	Rp	4.000.000
	c 15.000.000 s.d. 45.000.000	Dulan/Salaman	Rp	6.000.000
	Biaya Telepon			
	a Biaya Telepon Kantor	Dulan/Salaman	Rp	7.000.000
	b Biaya Telepon Kantor	Dulan/Salaman	Rp	1.500.000
	c Biaya Telepon Kantor/Sejarah	Dulan/Salaman	Rp	2.500.000
	d Biaya Telepon Kantor/Sejarah	Dulan/Salaman	Rp	750.000
	e Biaya Telepon Kantor/Sejarah	Dulan/Salaman	Rp	10.000.000
	f Biaya Telepon Kantor/Sejarah	Dulan/Salaman	Rp	500.000
N.	BIBLIOTEKA DAN PERAGARAAN			
	Biaya Material Kantor			
	a Biaya Material Kantor	01	Rp	900.000
	b Biaya Material Kantor	02	Rp	200.000
O.	BIBLIOTEKA DAN PERAGARAAN			
	Biaya Material Kantor			
	a Keperluan Kantor Dinas/Desa	Gunggung	Rp	25.000.000
	b Keperluan Kantor Dinas/GAJ Dinas	Gunggung	Rp	25.000.000
	c Keperluan Kantor Dinas/GAJ Dinas	Gunggung	Rp	200.000.000
	d Keperluan Kantor Dinas/GAJ Dinas	Gunggung	Rp	1.000.000.000
	e Keperluan Kantor Dinas/GAJ Dinas	Gunggung	Rp	200.000.000
	f Keperluan Kantor Dinas/GAJ Dinas	Gunggung	Rp	1.000.000.000
	g Keperluan Kantor Dinas/GAJ Dinas	Gunggung	Rp	6.000.000.000

3	Biaya Sewa Kantor/Rentokan Kantor			
+	Sewa Ruang Kantor Gedung	Per/Tahun	Rp	120.000.000
+	Sewa Rumah Dinas Wakil Bupati	Per/Tahun	Rp	110.000.000
+	Sewa Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Per/Tahun	Rp	15.000.000
+	Sewa Ruang Dinas Admisi	Per/Tahun	Rp	50.000.000
+	Sewa Kantor DSD	Per/Tahun	Rp	30.000.000
XVIII. BIAYA PEMERIKSAAN PERALATAN KANTOR				
1	Biaya Inspeksi dan Pengawasan (IG)			
+	Konsumsi Bahan Baku (BB)	Per/Tahun	Rp	1.000.000
2	Biaya Pemeliharaan Gedung, Sertifikat dan yang sejenis			
+	Lapang, Sertifikat dan yang sejenis lainnya (GPH)	Per/Tahun	Rp	1.000.000
3	Biaya Pemeliharaan Peralatan			
+	Perawatan Kendaraan (PK)	Per/Tahun	Rp	1.000.000
4	Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Peralatan Tangga			
+	Belanja Pemeliharaan Meja, Kursi, Lemari dan Meubelair	Per/Tahun	Rp	1.000.000
+	Belanja Pemeliharaan Mesin Kantor	Per/Tahun	Rp	250.000
+	Sewa dan Konsumsi	Per/Tahun	Rp	1.000.000
+	Akumulasi (AK)	Per/Tahun	Rp	1.500.000
+	Biaya Pemeliharaan Alat-alat KVA	Per/Tahun	Rp	5.000.000
+	Biaya Pemeliharaan KVA	Per/Tahun	Rp	3.500.000
XIX. BIAYA PANGADAT DINAS (BIAYA BUKSINGAL)				
1	Biaya Pakuan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
+	Pakuan Sipil Lampung/Provinsi Lampung/Seputra	Ses	Rp	1.000.000
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	1.750.000
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	1.000.000
+	Pakuan Dinas Benda	Ses	Rp	2.500.000
+	Pakuan Dinas Upacara	Ses	Rp	6.000.000
+	Pakuan Lainnya	Ses	Rp	1.500.000
+	Pakuan Bank	Ses	Rp	1.350.000
+	Pakuan Benda Lampung Lampung (PRL)	Ses	Rp	1.000.000
2	Biaya Pakuan Dinas Sekeloa/Desa-desa dan Kantor			
+	Pakuan Sipil Lampung/Provinsi Lampung/Seputra	Ses	Rp	1.500.000
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	2.500.000
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	2.400.000
+	Pakuan Dinas Benda	Ses	Rp	1.500.000
+	Pakuan Lainnya	Ses	Rp	1.000.000
+	Pakuan Bank	Ses	Rp	800.000
+	Pakuan Benda Lampung Lampung (PRL)	Ses	Rp	2.500.000
3	Biaya Pakuan Dinas Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Sekeloa dan Desa/Kantor Kepala Daerah Sekeloa dan Kantor			
+	Pakuan Sipil Lampung	Ses	Rp	2.000.000
+	Pakuan Sipil Benda/Ruang Lampung Lampung/Seputra	Ses	Rp	2.500.000
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	1.750.000
+	Pakuan Dinas Benda	Ses	Rp	1.200.000
+	Pakuan Lainnya	Ses	Rp	700.000
+	Pakuan Bank	Ses	Rp	600.000
+	Pakuan Benda Lampung Lampung (PRL)	Ses	Rp	2.500.000
4	Biaya Pakuan Dinas Sekeloa			
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	1.000.000
+	Pakuan Sipil Benda	Ses	Rp	1.000.000

1.	Suku Papan dan dan Rp270 miliar s.d Rp350 miliar	00	Rp	5.140.000
2.	Suku Papan dan dan Rp350 miliar s.d Rp400 miliar	00	Rp	5.140.000
3.	Suku Papan dan dan Rp400 miliar	00	Rp	7.140.000
4.	Pejabat Pelaksanaan Tekniks Kegiatan (PPTK)			
1.	Suku Papan dan dan Rp100 juta	00	Rp	1.000.000
2.	Suku Papan dan dan Rp100 juta s.d Rp150 juta	00	Rp	1.500.000
3.	Suku Papan dan dan Rp150 juta s.d Rp200 juta	00	Rp	1.500.000
4.	Suku Papan dan dan Rp200 juta s.d Rp300 miliar	00	Rp	1.600.000
5.	Suku Papan dan dan Rp300 miliar s.d Rp400 miliar	00	Rp	1.900.000
6.	Suku Papan dan dan Rp400 miliar s.d Rp500 miliar	00	Rp	2.500.000
7.	Suku Papan dan dan Rp500 miliar s.d Rp600 miliar	00	Rp	2.600.000
8.	Suku Papan dan dan Rp600 miliar s.d Rp700 miliar	00	Rp	2.900.000
9.	Suku Papan dan dan Rp700 miliar s.d Rp800 miliar	00	Rp	3.200.000
10.	Suku Papan dan dan Rp800 miliar s.d Rp900 miliar	00	Rp	3.700.000
11.	Suku Papan dan dan Rp900 miliar s.d Rp1000 miliar	00	Rp	4.120.000
12.	Suku Papan dan dan Rp1000 miliar s.d Rp1500 miliar	00	Rp	4.600.000
13.	Suku Papan dan dan Rp1500 miliar s.d Rp2000 miliar	00	Rp	5.100.000
14.	Suku Papan dan dan Rp2000 miliar s.d Rp3000 miliar	00	Rp	5.900.000
15.	Suku Papan dan dan Rp3000 miliar s.d Rp4000 miliar	00	Rp	6.100.000
16.	Suku Papan dan dan Rp4000 miliar	00	Rp	7.100.000
17.				
18.	Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Berwujud Paralel (PAK-000)			
1.	Suku Papan dan dan Rp100 juta	00	Rp	400.000
2.	Suku Papan dan dan Rp100 juta s.d Rp200 juta	00	Rp	400.000
3.	Suku Papan dan dan Rp200 juta s.d Rp300 juta	00	Rp	500.000
4.	Suku Papan dan dan Rp300 juta s.d Rp400 juta	00	Rp	600.000
5.	Suku Papan dan dan Rp400 juta s.d Rp500 juta	00	Rp	700.000
6.	Suku Papan dan dan Rp500 juta s.d Rp600 juta	00	Rp	800.000
7.	Suku Papan dan dan Rp600 juta s.d Rp700 juta	00	Rp	900.000
8.	Suku Papan dan dan Rp700 juta s.d Rp800 juta	00	Rp	1.000.000
9.	Suku Papan dan dan Rp800 juta s.d Rp900 juta	00	Rp	1.100.000
10.	Suku Papan dan dan Rp900 juta s.d Rp1000 juta	00	Rp	1.200.000
11.	Suku Papan dan dan Rp1000 juta s.d Rp1500 juta	00	Rp	1.400.000
12.	Suku Papan dan dan Rp1500 juta s.d Rp2000 juta	00	Rp	1.600.000
13.	Suku Papan dan dan Rp2000 juta s.d Rp3000 juta	00	Rp	1.800.000
14.	Suku Papan dan dan Rp3000 juta s.d Rp4000 juta	00	Rp	2.000.000
15.	Suku Papan dan dan Rp4000 juta s.d Rp5000 juta	00	Rp	2.200.000
16.	Suku Papan dan dan Rp5000 juta s.d Rp6000 juta	00	Rp	2.400.000
17.	Suku Papan dan dan Rp6000 juta s.d Rp7000 juta	00	Rp	2.600.000
18.	Suku Papan dan dan Rp7000 juta s.d Rp8000 juta	00	Rp	2.800.000
19.	Suku Papan dan dan Rp8000 juta s.d Rp9000 juta	00	Rp	3.000.000
20.	Suku Papan dan dan Rp9000 juta s.d Rp10000 juta	00	Rp	3.200.000
21.	Suku Papan dan dan Rp10000 juta s.d Rp15000 juta	00	Rp	3.400.000
22.	Suku Papan dan dan Rp15000 juta s.d Rp20000 juta	00	Rp	3.600.000
23.	Suku Papan dan dan Rp20000 juta s.d Rp30000 juta	00	Rp	3.800.000
24.	Suku Papan dan dan Rp30000 juta	00	Rp	3.800.000
25.				
26.	Berkas Pengalokasian Revisi dan Peninjauan			
1.	Suku Papan dan dan Rp100 juta	00	Rp	300.000
2.	Suku Papan dan dan Rp100 juta s.d Rp150 juta	00	Rp	400.000
3.	Suku Papan dan dan Rp150 juta s.d Rp200 juta	00	Rp	500.000
4.	Suku Papan dan dan Rp200 juta s.d Rp300 miliar	00	Rp	550.000
5.	Suku Papan dan dan Rp300 miliar s.d Rp400 miliar	00	Rp	600.000
6.	Suku Papan dan dan Rp400 miliar s.d Rp500 miliar	00	Rp	700.000
7.	Suku Papan dan dan Rp500 miliar s.d Rp600 miliar	00	Rp	750.000
8.	Suku Papan dan dan Rp600 miliar s.d Rp700 miliar	00	Rp	800.000
9.	Suku Papan dan dan Rp700 miliar s.d Rp800 miliar	00	Rp	850.000
10.	Suku Papan dan dan Rp800 miliar s.d Rp900 miliar	00	Rp	900.000
11.	Suku Papan dan dan Rp900 miliar s.d Rp1000 miliar	00	Rp	950.000
12.	Suku Papan dan dan Rp1000 miliar s.d Rp1500 miliar	00	Rp	1.000.000
13.	Suku Papan dan dan Rp1500 miliar s.d Rp2000 miliar	00	Rp	1.100.000
14.	Suku Papan dan dan Rp2000 miliar s.d Rp3000 miliar	00	Rp	1.200.000
15.	Suku Papan dan dan Rp3000 miliar s.d Rp4000 miliar	00	Rp	1.300.000
16.	Suku Papan dan dan Rp4000 miliar s.d Rp5000 miliar	00	Rp	1.400.000
17.	Suku Papan dan dan Rp5000 miliar s.d Rp6000 miliar	00	Rp	1.500.000
18.	Suku Papan dan dan Rp6000 miliar s.d Rp7000 miliar	00	Rp	1.600.000
19.	Suku Papan dan dan Rp7000 miliar s.d Rp8000 miliar	00	Rp	1.700.000
20.	Suku Papan dan dan Rp8000 miliar s.d Rp9000 miliar	00	Rp	1.800.000
21.	Suku Papan dan dan Rp9000 miliar s.d Rp10000 miliar	00	Rp	1.900.000
22.	Suku Papan dan dan Rp10000 miliar s.d Rp15000 miliar	00	Rp	2.000.000
23.	Suku Papan dan dan Rp15000 miliar s.d Rp20000 miliar	00	Rp	2.100.000
24.	Suku Papan dan dan Rp20000 miliar s.d Rp30000 miliar	00	Rp	2.200.000
25.	Suku Papan dan dan Rp30000 miliar	00	Rp	2.300.000
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

311	BUDIDARASAH PENGADAAN BARANG/JASA				
	III.1	Rencana/Rincian Pejabat/Pengadaan Barang/Jasa	OP	Rp	610.000
		Rencana/Rincian Kelompok Kerja Pemeliharaan Pengadaan Barang/Jasa	OP		
	III.1.1	Manajemen Kelompok Kerja Pemeliharaan Pengadaan Barang/Jasa (Kontrol)	OP		
	a	Suku Pagar pengadaan barang di atas Rp 200 juta	OP	Rp	600.000
	b	Suku Pagar pengadaan barang Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp	850.000
	c	Suku Pagar pengadaan barang Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp	1.050.000
	d	Suku Pagar pengadaan barang Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp	1.250.000
	e	Suku Pagar pengadaan barang Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp	1.500.000
	f	Suku Pagar pengadaan barang Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp	1.750.000
	g	Suku Pagar pengadaan barang Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp	2.100.000
	h	Suku Pagar pengadaan barang Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp	2.450.000
	i	Suku Pagar pengadaan barang Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp	2.750.000
	j	Suku Pagar pengadaan barang Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp	3.050.000
	k	Suku Pagar pengadaan barang Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp	3.500.000
	l	Suku Pagar pengadaan barang Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp	4.000.000
	m	Suku Pagar pengadaan barang Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp	4.450.000
	n	Suku Pagar pengadaan barang Rp750 miliar s.d Rp1 miliar	OP	Rp	4.800.000
	o	Suku Pagar pengadaan barang Rp1 miliar	OP	Rp	5.000.000
	III.1.2	Beberapa/Rincian Kelompok Kerja Pemeliharaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Kontrol)			
	a	Suku Pagar pengadaan barang sampai dengan Rp 50 juta	OP	Rp	100.000
	b	Suku Pagar pengadaan barang Rp50 juta s.d Rp75 juta	OP	Rp	150.000
	c	Suku Pagar pengadaan barang Rp75 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp	200.000
	d	Suku Pagar pengadaan barang Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp	250.000
	e	Suku Pagar pengadaan barang Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp	300.000
	f	Suku Pagar pengadaan barang Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp	350.000
	g	Suku Pagar pengadaan barang Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp	400.000
	h	Suku Pagar pengadaan barang Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp	450.000
	i	Suku Pagar pengadaan barang Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp	500.000
	j	Suku Pagar pengadaan barang Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp	550.000
	k	Suku Pagar pengadaan barang Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp	600.000
	l	Suku Pagar pengadaan barang Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp	650.000
	m	Suku Pagar pengadaan barang Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp	700.000
	n	Suku Pagar pengadaan barang Rp750 miliar s.d Rp1 miliar	OP	Rp	750.000
	III.1.3	Beberapa/Rincian Kelompok Kerja Pemeliharaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Kontrol)			
	a	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	Rp	450.000
	b	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp	480.000
	c	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi s.d Rp100 juta	OP	Rp	510.000
	d	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp200 juta	OP	Rp	540.000
	e	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp	600.000
	f	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp	650.000
	g	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp	700.000
	h	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp	750.000
	i	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp	800.000
	j	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp	850.000
	k	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp	900.000
	l	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp	950.000
	m	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp	1.000.000
	n	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp	1.050.000
	o	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp	1.100.000
	p	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp	1.150.000
	q	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 miliar	OP	Rp	1.200.000
	r	Suku Pagar pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar	OP	Rp	1.250.000

	Program Pengembangan Struktur dan Material Lempung			
+	Pengujian Kelemban/Peng Baku	Orang/Baku	Rp	400.000
+	Pengujian Gung Saku, Peng nyakit, Peng Basaran	Orang/Baku	Rp	10.000.000
+	Jasa Pengujian	1 Kali	Rp	2.000.000
+	Waktu	Kali	Rp	2.000.000
+	SPK	Kali/Tahun	Rp	20.000.000
	Program Penelitian Kelemban/Pengujian Baku			
+	Pengujian Kelemban/Peng Baku	Orang/Baku	Rp	400.000
+	Pengujian Peng Saku, Peng nyakit, Peng Basaran	Orang/Baku	Rp	1.200.000
+	Jasa Pengujian	1 Kali	Rp	2.000.000
+	Waktu	Kali	Rp	2.000.000
	B. Biaya Rancang-Build dan Peningkatan Struktural			
	Lakal Penyelidikan P.M.B.			
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Biaya Konsultasi	2	Rp	21.000.000
	Lakal Perencanaan P.M.B.			
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Biaya Konsultasi	2	Rp	22.000.000
	P.M.B. Penyelidikan P.M.B.			
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Biaya Konsultasi	2	Rp	23.000.000
	Biaya Perencanaan Baku			
+	Biaya Perencanaan Baku	Kepala	Rp	6.000.000
+	Biaya Konsultasi Baku	Kepala	Rp	6.000.000
+	Biaya Konsultasi Baku	Orang/Kali	Rp	2.000.000
+	Pendanaan, Pembinaan	Orang/MP	Rp	100.000
+	Jasa Konsultasi Pengendalian	Kepala	Rp	6.000.000
	Dana dan Biaya Lain-Lain (Sesuai dengan Peraturan 202/2012 dan Peraturan Lempung)			
+	Biaya SPK	Orang/Sesuai	Rp	200.000
+	Biaya Pengujian	Orang/Kali	Rp	2.500.000
+	Pengujian Kelemban, Peng Basaran	Orang/Kali	Rp	1.500.000
+	Waktu	Orang/Kali	Rp	1.000.000
+	Jasa Pengujian	Orang/Kali	Rp	200.000
+	Biaya Jasa Konsultasi	Orang/Rp	Rp	200.000
	C. Biaya Rancang-Build dan Peningkatan Struktural			
+	Pengujian Kelemban/Peng Baku dan Baku Lain	Orang/Baku	Rp	400.000
+	Pengujian Gung Saku, Peng nyakit, Peng Basaran	Orang/Baku	Rp	10.000.000
+	Jasa Pengujian	1 Kali	Rp	2.000.000
+	Waktu	Kali	Rp	2.000.000
+	SPK	Kali/Tahun	Rp	20.000.000
	D. Biaya Rancang-Build dan Peningkatan Struktural			
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Biaya Konsultasi	2	Rp	22.000.000
	10.2. BENDUKURAN DAN PERALATAN PERBAHASAN			
+	Pengujian Kelemban/Peng Baku dan Baku Lain	Orang/Baku	Rp	400.000
+	Pengujian Gung Saku, Peng nyakit, Peng Basaran	Orang/Baku	Rp	1.000.000
+	Jasa Pengujian	1 Kali	Rp	2.000.000
+	Waktu	Kali	Rp	2.000.000
+	SPK	Kali/Tahun	Rp	20.000.000
	E. Biaya Rancang-Build dan Peningkatan Struktural			
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Estimasi Perencanaan Lempung dan Baku dan Baku Lain	2	Rp	200.000
+	Biaya Konsultasi	2	Rp	22.000.000
+	Pengujian Kelemban/Peng Baku dan Baku Lain	Orang/Baku	Rp	400.000
+	Pengujian Gung Saku, Peng nyakit, Peng Basaran	Orang/Baku	Rp	1.000.000
+	Jasa Pengujian	1 Kali	Rp	2.000.000
+	Waktu	Kali	Rp	2.000.000
+	SPK	Kali/Tahun	Rp	20.000.000

	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Sekretaris	Daerah/Bulan	Rp.	1.400.000
	Sekretaris	Daerah/Bulan	Rp.	500.000
	Anggota	Daerah/Bulan	Rp.	300.000
	Tim Duta Pengabdian Masyarakat dan Sekelompok Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri			
	Dipaparkan oleh di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri			
	Penanggungjawab	Daerah/Bulan	Rp.	4.500.000
	Sekretaris/anggota Tim Duta	Daerah/Bulan	Rp.	4.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Anggaran			
	Anggota	Daerah/Bulan	Rp.	5.000.000
	Perwakilan Sekretariat UPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri			
	Kondusur Sekretariat	Daerah/Bulan	Rp.	1.000.000
	Supp. St. Sekretariat	Daerah/Bulan	Rp.	2.000.000
	Tim Duta Pengabdian Masyarakat dan Sekelompok Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri			
	Akronisasi Tim Duta UPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri			
	Konduktor Pengabdian	Daerah/Bulan	Rp.	2.000.000
	Wakil Sekelompok Pengabdian	Daerah/Bulan	Rp.	500.000
	Sekretaris/anggota	Daerah/Bulan	Rp.	1.200.000
	Anggota Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	800.000
	Wk. Ketua Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	600.000
	Sekretaris Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	400.000
	Anggota Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	400.000
	Anggota Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	750.000
	Sek. St. Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	800.000
	Anggota Bidang	Daerah/Bulan	Rp.	400.000
	Sekretariat Tim			
	Sekretaris	Daerah/Bulan	Rp.	600.000
	Sekretaris	Daerah/Bulan	Rp.	450.000
	Anggota Sekretariat	Daerah/Bulan	Rp.	300.000
	Perwakilan Sekretariat JIG di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri			
	Sekretaris	Daerah/Bulan	Rp.	1.400.000
	Supp. St. Sekretariat	Daerah/Bulan	Rp.	1.700.000
	Revisi Laporan Realisasi Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat BAK DAK (Garis-Garis)			
	Penanggungjawab/anggota Tim Duta	Daerah/Bulan	Rp.	2.000.000
	Anggota Tim Duta	Daerah/Bulan	Rp.	1.500.000
	Staf Duta Bidang BAK dan DAK			
	Staf Duta Bidang DAK dan DAK	Daerah/Bulan	Rp.	15.000.000
	Staf Duta Bidang DAK dan DAK	Daerah/Bulan	Rp.	20.000.000
	Staf Duta Bidang BAK dan DAK	Daerah/Bulan	Rp.	25.000.000
	Tim Duta dan Konsultan Individu			
	Konsultan Individu Pengabdian Masyarakat	Daerah/Bulan	Rp.	3.000.000
	Konsultan Individu Pengabdian Masyarakat	Daerah/Bulan	Rp.	4.000.000
	Salah Satu Pelaksanaan Program IPMIP			
	Sekretaris Koordinator	Daerah/Bulan	Rp.	1.000.000
	Kasubbag Administrasi	Daerah/Bulan	Rp.	2.000.000
	Sekretaris Koordinator	Daerah/Bulan	Rp.	2.000.000
	Tim Duta dan Pelaksanaan Program IPMIP			
	Ilustrasi Tim Duta dan Pelaksanaan	Daerah/Bulan	Rp.	1.200.000
	Bantuan Operasional Tim Duta dan Pelaksanaan	Daerah/Bulan	Rp.	2.000.000

XVI.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DIRAS				
	XVI.1	Biaya Antrasi Kendaraan Diras			
	•	Roda 4 dan Roda 6	Unit/Tahun	Rp.	Max. 5% dari harga jual
	•	Roda 2 dan Roda 3	Unit/Tahun	Rp.	Max. 5% dari harga jual
	XVI.2	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor untuk BUPATI PESAWARAN			
	•	Biaya Reparasi dan Pergantian Suku Cadang	Unit/Tahun	Rp.	23.000.000
	•	Biaya Service	Unit/Tahun	Rp.	21.000.000
	•	Bantuan biaya Pembelian BBM	Unit/Bulan	Rp.	13.000.000
	•	Bantuan biaya Pembelian Pelumas	Unit/Bulan	Rp.	1.500.000
	•	Pembelian Accu	Unit/Tahun	Rp.	2.000.000
	•	Pembelian Ban	Unit/Tahun	Rp.	12.000.000
	XVI.3	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor untuk WAKIL BUPATI PESAWARAN			
	•	Biaya Reparasi dan Pergantian Suku Cadang	Unit/Tahun	Rp.	23.000.000
	•	Biaya Service	Unit/Tahun	Rp.	20.000.000
	•	Bantuan biaya Pembelian BBM	Unit/Bulan	Rp.	12.500.000
	•	Bantuan biaya Pembelian Pelumas	Unit/Bulan	Rp.	1.500.000
	•	Pembelian Accu	Unit/Tahun	Rp.	1.500.000
	•	Pembelian Ban	Unit/Tahun	Rp.	12.000.000
	XVI.4	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor untuk SEKRETARIS DAERAH			
	•	Biaya Reparasi dan Pergantian Suku Cadang	Unit/Tahun	Rp.	17.250.000
	•	Biaya Service	Unit/Tahun	Rp.	12.250.000
	•	Bantuan biaya Pembelian BBM	Unit/Bulan	Rp.	8.000.000
	•	Bantuan biaya Pembelian Pelumas	Unit/Bulan	Rp.	750.000
	•	Pembelian Accu	Unit/Tahun	Rp.	1.500.000
	•	Pembelian Ban	Unit/Tahun	Rp.	12.000.000
	XVI.5	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor untuk ASISTEN			
	•	Biaya Reparasi dan Pergantian Suku Cadang	Unit/Tahun	Rp.	11.500.000
	•	Biaya Service	Unit/Tahun	Rp.	9.500.000
	•	Bantuan biaya Pembelian BBM Asisten	Unit/Bulan	Rp.	5.000.000
	•	Bantuan biaya Pembelian BBM Kepala Badan/Diras	Unit/Bulan	Rp.	4.500.000
	•	Bantuan biaya Pembelian Pelumas	Unit/Bulan	Rp.	750.000
	•	Pembelian Accu	Unit/Tahun	Rp.	1.500.000
	•	Pembelian Ban	Unit/Tahun	Rp.	8.000.000
	XVI.6	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Diras Pimpinan DPRD	Unit/Bulan	Rp.	4.300.000
		Biaya Pemeliharaan Kendaraan Diras Anggota DPRD	Unit/Bulan	Rp.	3.000.000
		Biaya Pemeliharaan Kendaraan Diras Staf Ahli/Inspektur/Kepala Badan/Diras	Unit/Bulan	Rp.	3.000.000
		Biaya Pemeliharaan Kendaraan Diras Kasan III	Unit/Bulan	Rp.	2.500.000
		Biaya Pemeliharaan Kendaraan Diras Kepala Desa	Unit/Bulan	Rp.	200.000
		Pick Up	Unit/Bulan	Rp.	2.000.000
		Truck	Unit/Bulan	Rp.	2.500.000
XVII.	BIAYA PEMELIHARAAN DAN SEWA BANGUNAN				
	1.	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Perkantoran			
	•	Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	Rp.	100.000
	•	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	Rp.	117.000
	•	Halaman Gedung Bangunan Kantor	m ² /Tahun	Rp.	10.000
	2.	Biaya Sewa Gedung Pertemuan			
	•	Sewa gedung pertemuan	Unit/Hari	Rp.	5.000.000

	+	Paksel Datas Harian	Sel	Rp	400.000
	+	Paksel G3000g	Sel	Rp	400.000
	+	Paksel Disk	Sel	Rp	500.000
	+	Paksel Bawa Lempar Lempar (PBL)	Sel	Rp	2.000.000
		Biaya Paksel Disk 320GB			
	+	Paksel Datas Harian	Sel	Rp	700.000
	+	Paksel G3000g	Sel	Rp	700.000
	+	Paksel Disk	Sel	Rp	450.000
	+	Paksel Bawa Lempar Lempar (PBL)	Sel	Rp	1.000.000
		Biaya Paksel Disk			
	+	Paksel Datas Harian	Sel	Rp	500.000
	+	Paksel G3000g	Sel	Rp	150.000
	+	Paksel Disk	Sel	Rp	300.000
		Biaya Paksel Bawa Lempar Lempar (PBL)			
	+	Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	5.000.000
	+	Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	3.000.000
	+	Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	5.000.000
	+	Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	2.000.000
	+	Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	2.000.000
	+	Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000
		Biaya Paksel Kelembagaan			
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	200.000
	+	Paksel Kelembagaan	Sel	Rp	400.000
	+	Paksel Kelembagaan	Sel	Rp	400.000
	+	Paksel Kelembagaan	Sel	Rp	400.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	4.000.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	400.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	400.000
		Biaya Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan			
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	2.000.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000
		Biaya Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan			
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	2.000.000
	+	Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	500.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	100.000
		Biaya Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan			
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000
	+	Paksel Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	Sel	Rp	1.000.000

SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA (KDOS)

TYPE UNIT	SATUAN	HARGA SEWA / TAHUN INCLUDE
AVANZA 1.3 G M/T	Unit	68.640.000
AVANZA 1.3 G A/T	Unit	72.000.000
RUSH 1.5 G M/T	Unit	87.840.000
RUSH 1.5 G A/T	Unit	91.320.000
KIJANG INOVA INNOVA 2.0 G M/T BSN	Unit	102.960.000
KIJANG INOVA INNOVA 2.0 G A/T BSN	Unit	108.360.000
KIJANG INOVA INNOVA 2.4 G M/T DSL	Unit	112.200.000
KIJANG INOVA INNOVA 2.4 G A/T DSL	Unit	118.680.000
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DSL	Unit	169.680.000
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T DSL	Unit	175.680.000
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T DSL	Unit	186.000.000
FORTUNER 2.4 G 4x4 A/T DSL	Unit	212.400.000
FORTUNER VRZ 2.4 G 4x4 A/T DSL	Unit	236.880.000
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T	Unit	113.640.000
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T	Unit	194.160.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kabupaten/Provinsi)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1.	ACEH	OH	360,000	140,000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110.000
3.	RIAU	OH	370,000	150,000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110.000
5.	JAMBI	OH	370,000	150,000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120.000
11.	BANTEN	OH	370,000	150,000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	210,000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120.000
17.	BALI	OH	480,000	190,000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110.000
31.	MALUKU	OH	380,000	150,000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130.000
33.	PAPUA	OH	580,000	230,000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140.000

Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	UANG REPRESENTASI	Dalam Kota Lebih Dari Delapan Jam
1.	Pejabat Negara	250.000	125.000
2.	Anggota DPRD	200.000	100.000
3.	Esselon II	150.000	75.000

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLOONGAN I/II
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, PEJABAT BESLON III	PEJABAT BESLON III/GOLOONGAN IV	PEJABAT BESLON IV/GOLOONGAN III	
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.326.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.900.000	1.519.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.114.000	1.580.000	652.000	652.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.851.000	637.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.030.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	630.000	630.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	3.401.000	2.087.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.500.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.627.000	2.828.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.371.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.000.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.853.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.400.000	654.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.617.000	2.675.000	1.381.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.035.000	1.070.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	3.890.000	1.916.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.943.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.800.000	1.493.000	1.335.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.664.000	1.516.000	1.125.000	528.000	528.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.401.000	3.791.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.707.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.189.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.367.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.939.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.158.000	2.544.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.030.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.507.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.654.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.518.000	657.000	657.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.656.000	718.000	718.000

ESTIMASI BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ROTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
1.	Gedong Tataan	Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
2.	Gedong Tataan	Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
3.	Gedong Tataan	Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
4.	Gedong Tataan	Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
5.	Gedong Tataan	Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
6.	Gedong Tataan	Mesuji	Orang/Kali	276.000
7.	Gedong Tataan	Bandar Lampung	Orang/Kali	380.000
8.	Gedong Tataan	Peaisir Barat	Orang/Kali	200.000
9.	Gedong Tataan	Pringsewu	Orang/Kali	222.000
10.	Gedong Tataan	Tanggamus	Orang/Kali	240.000
11.	Gedong Tataan	Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
12.	Gedong Tataan	Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
13.	Gedong Tataan	Way Kanan	Orang/Kali	270.000
14.	Gedong Tataan	Metro	Orang/Kali	234.000

ESTIMASI SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMHOK	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.707.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.472.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.261.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.921.000
11	JAKARTA	JAMBE	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.410.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.509.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.262.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.510.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALMERAH	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.521.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.416.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	WADJUNG	2.064.000	1.476.000
36	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
37	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.413.000
38	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
39	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
40	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
41	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
42	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
43	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.483.000
44	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.141.000
45	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
46	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.303.000
47	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.624.000
48	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
49	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.429.000	3.350.000
50	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
51	BANDAR LAMPUNG	PALMERAH	4.931.000	2.760.000
52	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.462.000	3.433.000
53	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
54	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.921.000	3.685.000
55	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.921.000	2.824.000
56	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.366.000	3.123.000
57	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.155.000
58	BANDAR LAMPUNG	TALIK PAPAN	8.129.000	4.129.000

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH FASILITAS
TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No		Tingkat Perjalanan	Transportasi		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Bupati dan Ketua DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/ Eksekutif
2	Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/ Eksekutif
3	Eselon II dan Anggota DPRD dan Dewan Riset Daerah	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Eselon III/ Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas IA	Eksekutif
5	Eselon IV/ Golongan III/II/I dan Non PNS	D	Ekonomi	Kelas IA	Eksekutif

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI

NO	PEJABAT, ESSELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KET.
1.	Bupati dan Ketua DPRD	A	Hintang Lima	
2.	Wakil Bupati	A	Hintang Lima	
3.	Sekretaris Daerah	A	Hintang Lima	
4.	Eselon II/ Anggota DPRD	B	Hintang Empat	
5	Eselon III/ Golongan IV	C	Hintang Tiga	
6	Eselon IV/ Golongan III/II/I dan Non PNS	D	Hintang Dua	

Merupakan batas tertinggi. Biaya penginapan dibayar sesuai dengan *at cost* atau realisasi harga kamar hotel/ penginapan, namun tidak boleh melebihi dari pagu yang sudah ditetapkan. Jika melebihi, maka ditanggung pelaksanaan SPD.

**) Bersifat estimasi. Harga tiket yang ditanggung oleh DPA disesuaikan dengan *at cost* atau realisasi harga pembelian tiket pesawat.

***) Jika tidak memperoleh tiket transportasi (misalkan tiket bus/taksi/kendaraan lainnya) maka dimasukkan sebagai Daftar Pengetuan Riil.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

NO	KECAMATAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Antar Kecamatan dalam Kabupaten	OH	150.000
2	Kecamatan ke Desa, Desa ke Kecamatan, Desa ke Desa dalam Kecamatan	OH	75.000

catatan:

1. Uang harian yang digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat parsial, dibayarkan dengan besaran yang sama untuk semua tingkatan biaya perjalanan dinas.
2. Bagi Pejabat, Pegawai Kabupaten Pesawaran yang melakukan perjalanan dinas tujuan ke desa - desa hanya diberikan uang harian sampai ibukota kecamatan.
3. Perjalanan Dinas kecamatan ke desa, desa ke kecamatan dan desa ke desa dibayar perhari kerja bukan perjumlah desa yang dikunjungi.

SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN ANTAR PULAU DALAM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NO	URAIAN	BANTUAN (Rp)
1.	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Pesawaran perorang (PP)	300.000
2.	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Pesawaran dengan jumlah peserta maksimal 10 orang, bantuan transport penyeberangan per Tim (PT)	3.000.000
3.	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Pesawaran dengan jumlah peserta maksimal 20 orang, bantuan transport penyeberangan per Tim (PT)	6.000.000
4.	Perjalanan dinas ke daerah terpeci dengan menggunakan ojek diberikan bantuan/orang (PP)	100.000

BIAYA TRANSPORT PULANG PERGI BAGI PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH MENGGUNAKAN KENDARAAN UMUM DAN BANTUAN BBM BAGI PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

NO	KECAMATAN	JARAK TUJUAN PP (km)	BANTUAN BBM (liter)		BANTUAN TRANSPORT PP (Rp)
			MOBIL DINAS	MOTOR DINAS	
1.	TEGINENENG	80	8	4	40.000
2.	NEGERI KATON	30	3	1	30.000
3.	KEDONDONG	40	4	2	30.000
4.	WAY LIMA	30	3	2	25.000
5.	PADANG CERMIN	120	12	5	60.000
6.	PUNDUH PEDADA	172	17	7	100.000
7.	WAY KHILAU	40	4	2	30.000
8.	MARGA PUNDUH	165	16	7	100.000
9.	TELUK PANDAN	100	10	4	60.000
10.	WAY RATAI	70	7	2	50.000

catatan:

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 10 KM 1 Liter sesuai dengan jarak tempuh dan dapat diperhitungkan biaya real cost dengan melampirkan bukti
2. Bagi Pegawai dan Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke desa, hanya diberikan uang BBM sampai ibukota Kecamatan
3. Biaya bantuan transport dibayarkan perorang untuk biaya pergi ke tempat tujuan dan pulang dari tujuan
4. Desa ke Desa, Desa ke Kecamatan tidak diberikan BBM dan biaya transportasi
5. Biaya bantuan transport dibatasi bagi perjalanan dinas yang dilakukan maksimal 3 orang

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K